

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1. Kesimpulan**

Diskriminasi dan persekusi yang dialami oleh Ahmadiyah dilakukan begitu massif dan terstruktur. Untuk melancarkan perbuatan tersebut, terdapat pihak-pihak memiliki peran masing-masing; mulai dari MUI dengan fatwa tentang Ahmadiyah, munculnya SKB Tiga Menteri No. 3/2008 tentang Pembatasan Ahmadiyah, sampai kepada munculnya peraturan-peraturan diskriminatif terhadap masyarakat penganut aliran Ahmadiyah. Terlebih di Depok, Masjid Al-Hidayah disegel oleh pemerintah Kota Depok meskipun izin untuk mendirikan bangunan telah dimiliki oleh JAI, dan lebih dari itu, JAI pun juga memiliki izin untuk berdiri di Indonesia sejak tahun 1925 atau lebih dari 50 tahun.

Penelitian ini mengungkap bahwa diskriminasi dan persekusi yang dialami oleh JAI di Kota Depok, adalah disebabkan oleh pengaruh sosok figure terkuat di Kota Depok, yakni Walikota. Figure tersebut tentunya bergerak atas kepentingan dari segelintir kelompok yang mana pada akhirnya menanggalkan kepentingan masyarakat minoritas, dalam hal ini adalah Ahmadiyah yang juga merupakan warga negara Indonesia., kuatnya figure walikota ini dipengaruhi oleh adanya partai pengusungnya yakni PKS yang telah menguasai Kota Depok lebih dari 20 tahun, yang pada akhirnya mempengaruhi jajaran pemerintah Kota Depok seperti Kesbangpol, MUI, dan FKUB hal ini sangat disayangkan karena ketiga lembaga ini yang seharusnya memiliki peran untuk mengakomodir keamanan kelompok JAI, justru ikut serta untuk memperburuk keadaan dengan menekan kelompok JAI untuk kembali mengikuti aliran Islam arus utama yang diyakini oleh mayoritas muslim di Indonesia.

Selanjutnya, untuk mendeeskalisasi keadaan ini, kelompok JAI pun menggunakan politik kewargaannya untuk melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Hal unik bagi kelompok JAI di Depok adalah perlawanan digunakan dengan cara afirmasi kewargaan, dimana gerakan perlawanan dilakukan tanpa menekan atau mengubah struktur yang ada. Hal ini merupakan bagian dari jalan hidup

Ahmadiyah dimana motto yang mereka tekuni adalah “*Love for all hatred for none*” dimana Ahmadiyah harus tekun dalam mematuhi pemerintah, meskipun pemerintahannya diskriminatif. Bagi JAI, dengan menebarkan cinta kasih melalui aksi sosial, dialog dengan pemerintah, dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, niscaya hal tersebut dapat mengubah keadaan yang saat ini dialami oleh Ahmadiyah yakni diskriminasi dan persekusi.

## **VI.2. Saran**

Meskipun mulia, gerakan afirmasi dan transformasi kewargaan yang dilakukan oleh Jemaah Ahmadiyah Kota Depok tentu perlu dicermati dari segi internal dan eksternal. Sehingga penelitian ini akan sangat cocok dikembangkan oleh para pembaca jika ingin melihat dari segi keorganisasian, sumber daya, dan manajemen organisasi Ahmadiyah. Di samping itu, perlu digaris bawahi juga bahwa gerakan Jemaah Ahmadiyah Indonesia ini sangat rentan untuk dijatuhkan oleh kelompok yang kontra dengan aliran Ahmadiyah sehingga dibutuhkan juga analisis mendalam terkait peran organisasi masyarakat sipil dalam melindungi eksistensi Ahmadiyah di Indonesia.